

**MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
BERBASIS MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
MADRASAH BERMUTU DI MTs AL HIKMATURROHMANIYAH
SUKOREJO PASURUAN**

Suadi*

PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STAI SALAHUDDIN PASURUAN

email: soeadsy@gmail.com

Abstract: The article discusses the financing management model at MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan. A qualitative approach with descriptive analysis was used in this study. The technique of collecting data is by interview, observation, and documentation. The author uses the Miles and Hubberman models, data reduction, data display, and verification / conclusion in analyzing data. The results of the study show: *first*, the financing management model at MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan has been systematically following the management process, namely by implementing three important paths in which includes planning income and expenditure budgets, overseeing education financing that departs from the planned needs of both madrasah and the provisions of the local ministry of religion, the use of education funding is with certain considerations and priorities in previous planning, and supervision of education funding as a control and evaluation for future improvements. *Second*, the application of the financing management model at MTs Al Hikmarurohmaniyah Sukorejo Pasuruan is in accordance with the principles of quality development in the financing sector with procedures for planning, budgeting, supervision, and reporting. This is in accordance with the concept of quality management that the development of quality is all forms of development activities that must go through the process of planning, implementation, and reporting.

Keywords: Financing Management, Quality, Budget

Abstrak: Artikel membahas model manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan model Miles dan Hubberman, reduksi data, penayangan data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, model manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan terbilang telah mengikuti proses manajemen secara sistematis yaitu dengan melaksanakan tiga alur penting didalamnya diantaranya meliputi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengawasan pembiayaan pendidikan yang bertolak pada kebutuhan terencana baik dari pihak madrasah maupun ketentuan kementerian agama setempat, Penggunaan pembiayaan pendidikannya itu dengan pertimbangan dan prioritas tertentu pada perencanaan sebelumnya, dan pengawasan pembiayaan pendidikan sebagai kontrol sekaligus evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. *Kedua*, Penerapan model manajemen pembiayaan di MTs Al Hikmarurohmaniyah Sukorejo Pasuruan telah sesuai dengan prinsip pengembangan mutu disektor pembiayaan dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen mutu bahwa pengembangan mutu madrasah adalah segala bentuk kegiatan pengembangan yang harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Mutu, Anggaran

*Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Salahuddin

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga menuntut adanya peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah pentingnya madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan yang mampu memenejemen pembiayaan pendidikannya secara mandiri dengan mendasarkan pada pemberdayaan potensi masyarakat (umat) sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang kaya dan melimpah serta tersedia secara berkesinambungan.

Terkait dengan mutu, dalam konteks pendidikan di Indonesia, baik sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi, telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan standar mutu. Artinya madrasah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk bisa dikatakan bermutu minimal harus memenuhi standar mutu dan akan lebih bagus lagi jika melampaui standar tersebut. Dalam PP.N0.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dari 8 standar mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh madrasah, maka keberadaan standar pembiayaan menjadi salah satu penentu ketercapaian pemenuhan 7 standar mutu yang lain. Hal ini terjadi karena tanpa biaya maka pendidikan tidak berjalan, terlepas dari siapa yang akan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pendidikan (pemerintah atau masyarakat). Demikian juga jika biaya yang tersedia banyak tetapi tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi inefisiensi sistem pendidikan.

In-efisiensi sistem pendidikan menunjukkan ketidakbermutuan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mutlak bagi setiap madrasah yang menghendaki institusi dan sistem pendidikan yang akan dijalankannya menjadi bermutu, maka praktek manajemen pembiayaan yang baik tidak bisa dihindarkan. Sedangkan salah satu persoalan yang selama ini mewarnai tidak baiknya manajemen pembiayaan pendidikan adalah keterbatasan sumber biaya. Sehingga tawaran manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah yang bisa diupayakan oleh madrasah menjadi salah satu obat bagi persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia umumnya dan madrasah khususnya.

Penerapannya pada madrasah berarti penerapan manajemen kualitas yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Dengan TQM, madrasah berusaha menerapkan semua komponen menjadi berkualitas, mulai dari pengadaan hingga hasil produksinya. Siswa harus

berkualitas, sarana-prasarana berkualitas, hubungan kemasyarakatan berkualitas, metodologi, pendekatan, dan pelaksanaan berkualitas. Paling penting adalah tumbuhnya sebuah kultur organisasi yang berorientasi pada kualitas, dan organisasi yang menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung.¹

Sementara itu, penganggaran (*budgeting*) merupakan bagian dari proses menyusun anggaran sehingga anggaran (*budget*) menjadi hasil (bagian) dari penganggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara pucuk pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Guna menentukan perkiraan kebutuhan secara tepat maka setiap anggaran harus berorientasi ke masa depan.

Tahapan pelaksanaan anggaran meliputi penerimaan dan penggunaan keuangan Madrasah. Baik transaksi penerimaan maupun transaksi penggunaan harus dicatat, dikelompokkan secara benar melalui *accounting system* yang baik. Menurut sisi penerimaan maka dana yang terkumpul merupakan sumber biaya potensial untuk membiayai setiap kegiatan dan pengembangan pendidikan di Madrasah. Sumber penerimaan dana pendidikan madrasah berasal dari pemerintah pusat (Bantuan Operasional Sekolah/BOS); *blockgrant*; pemerintah provinsi; pemerintah kabupaten/kota; iuran komite Madrasah (sumbangan masyarakat). Sedangkan pembiayaan pendidikan madrasah terdiri dari: gaji guru dan karyawan; belanja barang; kegiatan pelajar; kegiatan komite Madrasah; belanja pemeliharaan; pengadaan pengembangan Madrasah; pengembangan Madrasah meliputi: pencapaian akreditasi Madrasah, kurikulum berstandar nasional, standar proses pembelajaran, pemenuhan standar penilaian, pemenuhan standar pengelolaan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan Madrasah.

Sedangkan tahap evaluasi anggaran dimaksudkan untuk melihat efektivitas anggaran dalam membiayai berbagai kegiatan dan aktiva yang ada. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk menemukan gagasan baru atau mekanisme keuangan, tetapi untuk menganalisis hasil dan melakukan perbaikan anggaran pada periode berikutnya. Pengawasan termasuk dalam tahapan evaluasi anggaran. Perencanaan budget dalam perencanaan pendidikan sudah dimulai ketika misi atau program telah selesai dibuat dan perencanaan operasional baru dikerjakan. Tetapi ada juga yang menyatakan pembuatan budget itu setelah analisis sistem selesai, yaitu saat dimulai menentukan metode dan alat.² Lebih lanjut, Pidarta menyatakan ada

¹Nawawi. 2006. Otoritas Manajemen Madrasah di Era otonom, *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, (Online), Vol.11, No.1, (<http://download.portalgaruda.org/article.php>, diakses 15 September 2016)

²Made Pidarta, 2005. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Asdi Mahasatya) ,hal.139

beberapa jenis perencanaan budget. Tiga diantaranya yang terkenal ialah : *Line-Item (Function-Object) Budget*, PPBS (*Planning Programming Budget System*), dan ZBB (*Zero-Base Baudgeting*). Perencanaan *Line-Item* ini sering disebut perencanaan budget secara traditional, mungkin Karen modelnya paling sederhana dan muncul pertamakali. Perencanaa *Line Item* ini tidak memberikan akuntabilitas, yaitu proses menjelaskan pemanfaatan dana dalam kontribusinya kepada pencapaian tujuan yang diinginkan.

PPBS (*Planning Programing Budgeting System*) adalah suatu pengorganisasian yang sistematis, analitis, dan informasi keuangan yang teritegrasi ke dalam semua program yang direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk menolong melakukan alokasi sumber pendidikan termasuk pembiayaan.ZBB (*Zero-Base-Budgeting*). Akibat kurang-berhasian PPBS, maka muncullah konsep baru dalam perencanaan budget yang disebut ZBB. Konsep ini didasari pada pendekatan “*ground up*” yaitu semua programdan aktivitas yang lama atau yang baru harus ditinjau kembali pada setiap proses *budgeting* setiap tahun.³

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis bermaksud memaparkan model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan madrasah bermutu di MTs Al Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Data kualitatif disederhanakan dan ditransformasikan dengan aneka macam cara, antara lain *Reading and re-reading*, *Initial noting*, *Depeloving emergent themes* (seleksi data yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, penggolongan dalam suatu pola yang lebih luas.⁴ Pelaksanaan penelitian kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu.⁵ Adapun penelitian kualitatif memiliki enam ciri-ciri yaitu: memperhatikan konteks dan situasi (*concern of context*); berlatar alamiah (*natural setting*); manusia sebagai instrumen utama (*human instrument*⁶); data bersifat deskriptif (*descriptive data*); rancangan penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan (*emergent design*); dan analisis data secara induktif (*inductive analysis*).

Selanjutnya rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam konteks dan jenis penelitian di atas, maka peneliti akan berusaha memaparkan realitas manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

³ Ibid, hal144-152

⁴Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal.137

⁵Winamo Surakhmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1990), hal.139.

⁶ Fatmasari Sukesti, *Analisis Penggunaan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja Pada Universitas Muhammadiyah Semarang* (UNIMUS: Prosiding Seminar Nasional, 2010), hal. 418.

Data dan Sumber Data

Menurut cara pemerolehannya, data dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.⁷

Dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berupa data verbal dari hasil wawancara dengan para informan yang kemudian peneliti catat dalam bentuk catatan tertulis, rekaman dengan menggunakan *recorder*,⁸ serta pengambilan foto. Sedangkan data dari pengamatan langsung akan peneliti catat dalam bentuk catatan lapangan. Selain itu, data primer yang berupa dokumen adalah dokumen-dokumen MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 3 macam, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dengan informan guna memperoleh data atau informasi tertentu.⁹ Adapun wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu wawancara terstruktur, hal ini dikarenakan informan yang menjadi sumber data orang-orang yang mempunyai kesibukan tertentu. Peneliti akan mendatangi satu per satu informan yang menjadi sumber data di atas untuk peneliti tanya tentang Konsep Madrasah Bermutu dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat di MTs Al Hikmaturohmaniyah.

2. Observasi

Adapun observasi yang akan peneliti lakukan yaitu observasi partisipatif, yaitu peneliti tidak hanya melihat-lihat lokasi penelitian saja melainkan peneliti akan ikut aktif dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan praktek manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia.¹⁰ Data-data dari non-manusia ini merupakan data yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal. 107.

⁸Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Tindakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 135.

⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 157.

¹⁰ Sukest.... *Analisis Penggunaan*, hal. 418.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Adapun model analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data ini meliputi kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.¹²

Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan *credibility*, *dependability*, dan *confirmability*. Istilah tersebut pada dasarnya merupakan kriteria yang bertujuan untuk menjamin *trustworthiness* (kelayakan untuk dipercaya) sebuah penelitian. Juga menggunakan triangulasi untuk hal tersebut.

HASIL PENELITIAN

Model Manajemen Pembiayaan Di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di MTs Al Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan

Dalam rencana anggaran, pendapatan belanja Madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluarannya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah cukup besar, penerimaan keuangan MTs Al-Hikmaturohmaniyah dari sumber prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Prosedur penerimaan keuangan MTs Al-Hikmaturohmaniyah diketahui ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan pemerintah yang intinya pihak Madrasah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluaran, Madrasah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Pola manajemen keuangan Madrasah terbatas pada pengelolaan dan tingkat operasional.

Salah satu kebijakan keuangan madrasah adalah adanya pencarian tambahan dana dari bantuan dari luar seperti halnya bantuan pihak donatur. Cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan dari pihak luar yang diperoleh memang tidak terlalu banyak, namun proses penggunaannya tetap meminta petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat.

Di samping itu, sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka Madrasah idealnya memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup besar dalam kaitannya dengan manajemen pembiayaan untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan Madrasah, akan tetapi realitas yang ada masih bersifat *topdown* dalam arti ada beberapa kebijakan keuangan diputuskan oleh Dinas Pendidikan setempat.

Pada dasarnya proses penyusunan anggaran dan belanja MTs Al-Hikmaturohmaniyah merupakan format yang sudah baku meliputi

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 88.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, ...*, hal. 92

perencanaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah (APBN dan APBD), siswa dan sumbangan para donatur lokal maupun asing lainnya baik dalam bentuk uang maupun barang. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan dana MTs Al-Hikmaturohmaniyah tahun Anggaran 2016, meliputi:

- a. Belanja pegawai/personalia dengan dana yang digunakan dari Madrasah tersebut rata-rata mencapai 93,50%.
- b. Belanja barang dan jasa sebesar dengan dana yang diserap mencapai 5%
- c. Biaya pemeliharaan sebesar 0,25%

Sementara dalam usulan rincian biaya pada RAPBM Tahun Anggaran 2018 pada MTs Al Hikmaturohmaniyah, terdapat komponen-komponen seperti belanja pegawai yang meliputi honorarium guru tidak tetap, honorarium kelebihan jam mengajar guru tetap dan guru tidak tetap, honorarium kelebihan jam mengajar guru tetap dan guru tidak tetap, honorarium panitia dan pengawas ujian. Di samping itu ada juga perencanaan anggaran untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perencanaan sebagai syarat mutlak yang harus ada sebelum kegiatan berlangsung. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka suatu kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami hambatan, bahkan terancam gagal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan anggaran pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah, perencanaan memiliki peran yang sangat penting karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik berkaitan dengan SDM maupun dengan sumber dana itu sendiri.

Tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) pada MTs Al Hikmaturohmaniyah adalah dengan menagadakan rapat dengan pihak-pihak terkait di lingkungan MTs Al-Hikmaturohmaniyah. Pihak terkait yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah, bendahara, guru senior dan komite Madrasah. Hasil musyawarah yang dilakukan berdasarkan petunjuk dari pihak Dinas Pendidikan setempat disusun sebuah perencanaan anggaran oleh pihak MTs Al-Hikmaturohmaniyah. Usulan rancangan tersebut kemudian diajukan kepada pihak Dinas Pendidikan setempat selaku penanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan di lingkungan tersebut.

Sumber-sumber dana yang diperoleh MTs Al-Hikmaturohmaniyah dalam menjalankan program pendidikan bisa dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu sumber dana yang menjadi sumber anggaran rutin pembiayaan berasal dari dana DIPA, APBN, APBD, dan dana yang berasal dari iuran siswa. Disamping itu ada juga sumber dana yang diperoleh MTs Al-Hikmaturohmaniyah sebagai dana tambahan adalah dana hasil kerjasama dengan instansi lain, seperti yang diperoleh dari bantuan lembaga lainnya.

2. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan

Penggunaan anggaran pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah dari berbagai sumber dana yang diperoleh seperti yang telah disebutkan di atas telah digunakan menurut pos pengeluaran masing-masing. Penggunaan atau pengeluaran dana pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah, sebagian besar pos pengeluaran sudah ada petunjuk teknis (Juknis) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Hal ini memberi kejelasan bahwa petunjuk yang bersifat *topdown*, sebenarnya idak selamanya efektif dilihat dari sisi manajemen pembiayaan pendidikan. Hal ini berpijak pada kenyataan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap lembaga pendidikan di tingkat bawah adalah tidak sama antara madrasah yang satu dengan lainnya.

Adapun wewenang penyaluran dana yang diberikan pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah berdasarkan RAPBM yang diusulkan dan sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan adalah dana DIPA. Pos-pos penggunaan dana alokasi dana yang disalurkan oleh MTs Al-Hikmaturohmaniyah yang berasal dari dana DIPA murni adalah penggunaan dana untuk keperluan: Belanja Honor, yang meliputi: guru honor, kelebihan jam mengajar, panitia ujian, pengawas ujian, pegawai bakti, dan lain-lain.

Selain dana di atas, ada juga dana RAPBM murni. Dana ini pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah digunakan untuk keperluan: a) Belanja Honor Guru Tidak Tetap, rapat pimpinan kepala madrasah, rapat madrasah dan petugas keamanan, b) belanja keperluan Sehari-hari Perkantoran, yang meliputi: biaya foto copy, konsumsi rapat, dan sebagainya.

Biaya yang memadai, akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja personil (guru dan tenaga administrasi), peningkatan kesejahteraan guru dan personil tata usaha, sarana dan prasarana pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah. Pengaruh positif lainnya akan mampu meningkatkan pelayanan kegiatan pembelajaran di Madrasah, yang salah satunya ditunjukkan dalam bentuk peningkatan mutu *output* MTs Al-Hikmaturohmaniyah.

Memandang prinsip-prinsip manajemen sebagai sesuatu yang mesti dilakukan dalam sebuah proses produksi, maka membuktikan untuk menempatkan manajemen sebagai salah satu yang ikut memberikan studi terhadap pencapaian produktivitas. Jika ada pengetahuan yang dapat dipercaya tentang sejauhmana seleksi *input* dihubungkan dengan seleksi *output*, maka dimungkinkan untuk mendefinisikan suatu fungsi yang akan menandai proses produksi dalam lembaga pendidikan, yaitu suatu fungsi yang bisa menunjukkan dengan tepat bagaimana suatu perubahan *input* akan mempengaruhi *output*.

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan

Salah satu fungsi organik manajemen adalah pengawasan. Pengawasan merupakan suatu upaya untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan operasional berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan merupakan kegiatan yang bersifat sistematis untuk memantau penyelenggaraan kegiatan operasional untuk melihat apakah tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang diharapkan tercapai atau tidak.

Pengawasan diperlukan karena ada dua alasan. Pertama, dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan operasional pada lembaga, para anggota organisasi Madrasah tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Bahkan juga mungkin khilaf dan salah. Berbagai kekurangan tersebut dapat berakibat pada tidak terwujudnya tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang diharapkan. Di samping itu, tidak mustahil bahwa harapan manajemen tidak sepenuhnya terpenuhi karena keterampilan teknis para penyelenggara sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan tuntutan tugas masing-masing. Kedua, tuntutan efisiensi, efektifitas dan produktifitas tidak terpenuhi karena mungkin ada anggota organisasi yang menampilkan perilaku yang negatif dengan berbagai faktor penyebab.

Kegiatan pengawasan jelas diperlukan sekaligus menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang sedang terjadi. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti dengan pelaporan, hasil wawancara, penyebaran kuesioner, dan pengamatan langsung oleh pengawas di lapangan.

Informasi tersebut akan sangat berguna dalam rangka peningkatan kinerja seluruh komponen operasional organisasi. Fungsi pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan penggunaan anggaran pada MTs Al-Hikmaturohmaniyah adalah untuk tingkat internal menjadi wewenang kepala Madrasah dan wakil kepala Madrasah pada Madrasah tersebut.

Semua dana yang masuk dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan pengeluaran dan penerimaan dana. Seperti halnya dana yang diperuntukkan untuk beasiswa yang berasal dari beberapa sumber. Semua bantuan beasiswa untuk MTs Al-Hikmaturohmaniyah, tetap dilakukan pengawasan dalam proses penyalurannya.

Dengan demikian pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan, karena kebutuhan merupakan bagian dari pengawasan melekat. Dalam manajemen pembiayaan, Kepala madrasah perlu melakukan pengendalian pengeluaran biaya selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya sebagai pimpinan, kepala madrasah bertanggungjawab terhadap masalah internal manajemen pembiayaan pada Madrasah yang dipimpinnya.

Pengawasan anggaran keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia serta pengambilan tindakan-tindakan perbaikan atau menggunakan jalur hukum apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya. pengawasan anggaran dilakukan bukan saja oleh kepala Madrasah dan pihak Dinas Pendidikan setempat, melainkan juga dari tim inspektorat pusat.

Kepala Madrasah sebagai atasan langsung dan sekaligus sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Madrasah, melakukan pengawasan anggaran secara rutin dan menerima laporan penerimaan dan penggunaan uang dari bendahara setiap hari. Sedangkan pihak Dinas Pendidikan setempat, melakukan pengawasan anggaran setiap bulan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran pemeriksaan baik

yang dilakukan kepala madrasah maupun pengawasan dari pihak-pihak eksternal meliputi pemeriksaan kas dan pemeriksaan penggunaan barang-barang inventaris MTs Al-Hikmaturohmaniyah.

Berpijak pada kondisi di atas, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan merupakan hal yang penting dalam proses manajemen pembiayaan. Anggaran dapat berjalan efektif jika mempertimbangkan aspek partisipasi penyusunan anggaran yaitu keikutsertaan semua komponen dalam penyusunan anggaran. Tingkat partisipasi tersebut, pada gilirannya akan mendorong moral kerja dan inisiatif kerja yang baik.

KESIMPULAN

Model manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmaturohmaniyah Sukorejo Pasuruan terbilang telah mengikuti proses manajemen secara sistematis yaitu dengan melaksanakan tiga alur penting didalamnya diantaranya meliputi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengawasan pembiayaan pendidikan yang bertolak pada kebutuhan terencana baik dari pihak madrasah maupun ketentuan kementerian agama setempat, Penggunaan pembiayaan pendidikannya itu dengan pertimbangan dan prioritas tertentu pada perencanaan sebelumnya, dan pengawasan pembiayaan pendidikan sebagai kontrol sekaligus evaluasi untuk pebaikan di masa mendatang.

Penerapan model manajemen pembiayaan di MTs Al Hikmarurohmaniyah Sukorejo Pasuruan telah sesuai dengan prinsip pengembangan mutu disektor pembiayaan dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen mutu bahwa pengembangan mutu madrasah adalah segala bentuk kegiatan pengembangan yang harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Tindakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Nawawi. *Otoritas Manajemen Madrasah di Era Otonom*, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, (Online), Vol.11, No.1,2006 (<http://download.portalgaruda.org/article.php>, diakses 15 September 2016)
- Pidarta, Made, 2005. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*,(Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2007)

Sukesti, Fatmasari, *Analisis Penggunaan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja Pada Universitas Muhammadiyah Semarang* (UNIMUS: Prosiding Seminar Nasional, 2010)

Surakhmad, Winamo, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1990)